

STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS BIRO PEMBERITAAN DPR RI DALAM MENJAGA CITRA POSITIF ORGANISASI

Veranus Sidharta¹, Anisti², Wenny Maya Arlena³, Azwar⁴

^{1,2} Jakarta Universitas Bina Sarana Informatika, ³Universitas Budi Luhur, ⁴Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Naskah diterima tanggal 29-12-2020, direvisi tanggal 21-01-2021, disetujui tanggal 28-02-2021

Abstrak. Artikel ini merupakan kajian atas strategi komunikasi humas Biro Pemberitaan DPR RI dalam menjaga reputasi dan citra positif organisasi. Hal penting yang mendasari penelitian ini adalah tidak kunjung baiknya citra DPR RI sebagai lembaga negara di mata masyarakat Indonesia. Selain kinerja DPR RI yang harus ditingkatkan, tentu saja humas sebagai halaman depan lembaga, berperan besar dalam mengubah citra negatif ini menjadi citra positif. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran Humas DPR RI dalam menjaga reputasi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti melakukan kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam terkait topik yang diteliti. Peneliti melakukan analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi) untuk melihat strategi komunikasi Humas Biro Pemberitaan DPR RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen politik legalitas DPR RI memuat wewenang dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara negara dalam perencanaan program pembentukan dan perubahan Undang-Undang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Instrumen Ekonomi dan Sosial meliputi anggaran dan kebijakan ekonomi, dimana DPR RI membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, serta faktor sosial mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan media dalam penyebaran informasi kebijakan, layanan masyarakat dan program berbagai *event* serta hubungan dengan media. Sedangkan faktor teknologi mencakup aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi berupa akses ketersediaan data dan informasi tentang program pemerintah tersediannya sistem dan jaringannya.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Citra Lembaga, Analisis PEST

Abstract.

This article is a study of the PR communication strategy of the DPR RI News Bureau in maintaining a positive image of the organization. The important thing that underlies this research is that it does not maintain the good image of the DPR RI as a state institution in the eyes of the Indonesian people. Apart from the performance of the DPR RI that must be remembered, public relations as the front page of the institution plays a major role in turning this negative image into a positive image. This research looks at the role of Public Relations of the DPR RI in maintaining the reputation of the organization. This Peliti uses a qualitative method where the researcher conducts a literature review, observation, and in-depth interviews related to the topic being studied. The researcher conducted a PEST (Political, Economic, Social and Technological) analysis designed by Francis Aguilar (1967) to see the PR communication strategy of the News Bureau of the DPR RI. The results of this study indicate that the legality political instrument of the DPR RI contains the authority and function of the state administering institution in planning the Ordering and amending Laws program that is planned, integrated, and systematic. Economic and social instruments include economic budgets and policies, where the DPR RI discusses and approves or does not approve a draft law on the state budget proposed by the president, as well as social factors covering aspects related to the use of media in disseminating policy information community services and programs of various events as well as relations with the media. Meanwhile, technological factors include aspects of information and

communication technology in the form of data access and information about government programs, the availability of systems and networks.

Keywords: communication strategy, institutional image, PEST analysis

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga yang harus memiliki reputasi positif adalah lembaga negara, karena lembaga ini merupakan lembaga penyelenggara negara yang dipercaya publik salah satunya adalah lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mempunyai tiga fungsi utama yaitu; Pertama, sebagai fungsi legislasi sebagai lembaga yang berfungsi dalam mengusulkan, membuat, dan mengesahkan undang-undang. Kedua sebagai fungsi anggaran, menyusun serta mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketiga sebagai fungsi pengawasan dimana DPR sebagai lembaga legislatif berfungsi mengawasi kinerja lembaga eksekutif dalam hal ini presiden dan para menteri. Selain fungsi-fungsi tersebut DPR RI juga berperan sebagai wakil rakyat di pemerintahan. Para anggota DPR RI lah yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.

Dari berberapa peran dan fungsi inilah yang menjadikan DPR RI sebagai organisasi yang wajib memiliki reputasi baik guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang diwakilinya. Keberadaan DPR RI dalam pemerintahan sebagai lembaga politik dituntut adanya reputasi positif dalam lembaga ini. Reputasi positif ini ditujukan agar publik atau masyarakat dapat mempercayai kinerja para wakil rakyatnya dan menciptakan kepercayaan kepada lembaga DPR. Reputasi positif dibutuhkan supaya tugas dan kewajiban para anggota DPR dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menerima semua hasil kerja DPR, yaitu pembuat undang-undang, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dan menyusun APBN.

Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas tahun 2019, menunjukkan, sebanyak 62,4% responden menilai DPR RI memiliki citra yang buruk. Responden yang menilai citra DPR RI baik hanya 24,8%. Responden yang menjawab tidak tahu dan tidak menjawab masing-masing sebesar 11,5% dan 1,3%. Selain itu, responden juga merasa langkah partai politik pilihan di DPR RI juga tidak mewakili aspirasi masyarakat. Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini digarap oleh DPR RI dinilai sarat akan kepentingan partai politik, yaitu sebanyak 69,2%. Survei ini diselenggarakan pada 18-19 September 2019 dengan melibatkan 529 responden berusia minimal 17 tahun yang dipilih secara acak bertingkat di 16 kota besar Indonesia. Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95% dengan margin error kurang lebih 4,3% (Kompas, 2019).

Data survei tersebut sejalan dengan pemberitaan tentang DPR RI sebagai lembaga negara yang sedang diterpa pemberitaan negatif terkait demo mahasiswa menolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK serta pemberitaan media yang mengganggu citra dan reputasinya. Beberapa media mengekspos berbagai permasalahan yang terjadi ditubuh DPR RI dengan para anggota DPR RI. Pemberitaan serta informasi negatif mengenai lembaga terhormat ini sudah sering terdengar di telinga masyarakat. Selain informasi dan pemberitaan, berbagai pendapat yang berkaitan dengan para anggota DPR RI juga selalu menghasilkan reputasi yang buruk serta menyudutkan para anggota dewan.

Merujuk pada banyaknya pemberitaan negatif terhadap DPR RI sebagai lembaga negara, maka diperlukan peran *Public Relations* atau humas yang baik guna dapat mempublikasikan kinerja anggota dewan dan keputusan lembaga demi menjaga reputasi positif kinerja anggota dewan. Peran humas sangat diperlukan dalam hubungan antara lembaga dan publiknya, menciptakan citra baik bagi Lembaga (*corporate image*) dan membina *relationship* positif dan saling menguntungkan dengan publiknya (Saputra & Nasrulah, 2011).

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan pengkajian terkait dengan strategi Humas DPR RI yang berperan dalam menjaga reputasi organisasi. Kajian ini menggunakan konsep humas pemerintahan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi peran humas DPR RI dalam menjaga citra positif serta mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam menjaga citra positif sebagai lembaga legislatif terhadap kinerja anggota DPR RI dan untuk mengetahui strategi media relations humas dalam mengelola citra

positif dan dalam mengatasi pemberitaan negatif mengenai DPR RI dengan menggunakan analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi) berdasarkan teknis analisis yang digagas oleh Francis Joseph Aguilar sebagaimana ia sampaikan dalam buku *Scanning the Business Environment*. New York: Macmillan (1967).

Definisi Publik Relations/Humas

Public Relations atau humas menurut Cutlip dkk (2005) merupakan fungsi manajemen khusus yang membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah, saling pengertian, penerimaan dan kerjasama antara organisasi dan masyarakatnya, yang melibatkan manajemen problem atau masalah, membantu manajemen untuk selalu mendapat informasi dan merespon pendapat umum, mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan masyarakat.

Secara umum ada dua macam, yaitu Humas Pemerintah (*Government Public Relations*) dan humas perusahaan (*Corporate Public Relations*). Humas yang berada pada lembaga publik peran, fungsi dan tugasnya sama dengan humas pada lembaga pemerintahan. Pentingnya keberadaan humas bagi sebuah organisasi sudah semakin banyak disadari. Humas membuat dan membantu perusahaan dalam menciptakan, membangun, dan menjaga citra dan reputasi dimata publik.

Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis, divisi humas dalam institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan kabijakan mereka, memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat (Kusumawati, 2004: 37).

Frank Jefkins (1992) mendefinisikan humas "*is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its public*" yang artinya humas merupakan aktifitas terencana dan terus menerus untuk membangun dan menjaga iktikad baik dan pengertian bersama antara organisasi dan publik.

Dr. Rex Harlow sebagaimana dikutip Rosadi Ruslan (2010) memberikan definisi terhadap humas dengan cukup baik. Ia menyampaikan bahwa: humas merupakan fungsi manajemen yang membantu membangun, menjaga komunikasi, penerimaan dan kerjasama antara organisasi dan publiknya termasuk juga dalam memajemen suatu masalah atau isu, membantu dan melibatkan manajemen untuk mampu menanggapi opini public, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa humas adalah bagian penting dari sebuah manajemen organisasi di dalam melihat keadaan diluar.

Tujuan dan Fungsi Humas

Humas (*Public Relations*) mempunyai tujuan utama untuk mempengaruhi publiknya, sejauh mana mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau instansi yang diwakilinya, yang pada akhirnya menjadi dikenal dan disukai publikasinya. Umumnya tujuan humas adalah "untuk menciptakan, meningkatkan, memelihara, serta memperbaiki citra perusahaan atau organisasi dimata publik dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi dari pada publik yang bersangkutan". Citra merupakan gambaran atau penilaian yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain, secara keseluruhan. Beberapa hal dilakukan untuk memperoleh citra positif ini diantaranya dengan *Public Confidence* (kepercayaan publik), *Public Cooperation* (kerjasama publik), *Public Understanding* (pengertian publik), *Public Support* (dukungan public) (Jefkins, 1992).

Menurut Syahputra (2019) fungsi humas pada masa lalu secara taktis fokus pada kegiatan *media relations* fungsi ini telah berpusat juga untuk komunikasi korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa hal terpenting dalam komunikasi lembaga merupakan saluran media yang digunakan.

Sementara itu Kriyantono (2008) menyampaikan bahwa fungsi humas adalah harapan publik terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh humas sesuai dengan kedudukannya sebagai humas. Jadi humas berfungsi apabila dia mampu melakukan tugas dan kewajiban dengan baik, berguna atau tidak dalam menunjang tujuan lembaga dan menjamin kepentingan publik.

Fungsi humas pemerintah yang terdapat dalam Panduan Umum Humas Pemerintah Bab III pasal 6 (Mory, 2008), sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, memberi pelayanan informasi kepada publik, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif, program, produk dan jasa lembaga, dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangku kepentingan.

Lebih jauh Mory (2008) menyampaikan bahwa fungsi utama humas pemerintahan Indonesia yaitu:

1. Mengamankan Kebijakan Pemerintah
2. Memberikan pelayanan dan menyebarkan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat.
3. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak
4. Berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Humas DPR RI

Terkait dengan fungsi dan tugas humas DPR RI, berdasarkan wawancara dengan Humas DPR RI, Indah Kurniasari (10 Desember 2019) dapat diketahui bahwa Struktur Organisasi Humas DPR RI berada di Biro Pemberitaan Parlemen, di level eselon 2, kepala biro pemberitaan parlemen. Humas membawahi 4 fungsi: (1) Bagian media cetak, (2) Bagian TV dan radio parlemen, (3) Bagian penerbitan, dan (4) Bagian Media sosial.

Sehingga fungsi sudah terpecah-pecah. Bagian radio elektronik dikerjakan, untuk cetak majalah-majalah, bulletin parlementaria, majalah parlementaria, buku-buku. Isinya media cetak adalah bagian tim media cetak, media sosial adalah bagian informasi tentang semua yang ada di DPR RI, untuk website, Instagram, youtube.

Fungsi dan tugas humas lebih langsung pada hubungan masyarakat, dengan programnya:

1. Penerangan memberikan penerangan kepada masyarakat, masyarakat disini adalah yang datang berkunjung adalah masyarakat mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa, dan umum.
2. Kegiatan Parlemen Remaja dan Parlemen Kampus, yaitu memberikan informasi-informasi yang dilakukan oleh DPR, tugas dan fungsi DPR serta memberikan pemahaman simulasi DPR saat bersidang, sehingga mereka memahami bagaimana sebenarnya dalam proses berjalannya sidang, seperti apa proses dalam memutuskan UU, diambilkan contoh kasus misalnya UU yang ada baik yang sedang dalam proses revisi atau yang sudah diberlakukan.
3. Kegiatan pameran, dilaksanakan di beberapa daerah lebih dengan menjelaskan pada fungsi, peran dan tugasnya kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti melakukan kajian kepustakaan untuk mendalami persoalan tentang strategi Humas DPR RI dalam menghadapi krisis. Selain itu peneliti juga melakukan observasi terhadap kebijakan Humas DPR RI baik dari produk-produk humas seperti majalah, website, dan akun media sosial. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pengelola Humas DPR RI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis PEST Strategi Komunikasi *Public Relation* Biro Pemberitaan DPR-RI

Menurut Mahadiansar dan Asparyana (2020) model PEST merupakan analisis terhadap kekuatan eksternal organisasi ataupun di luar dari sebuah program yang dapat mempengaruhi proses hasil yang diinginkan yang meliputi faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan teknologi.

Analisis PEST merupakan analisis terhadap faktor lingkungan eksternal lembaga atau organisasi, umumnya analisis ini digunakan untuk menilai kinerja dari suatu unit lembaga atau unit bisnis. PEST merupakan kerangka dalam menilai suatu situasi, strategi, arah, rencana, dan ide (Peppard, 2002). Analisa PEST berupa analisa faktor-faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan teknologi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi komunikasi *public relations* biro pemberitaan DPR RI dapat dijelaskan sebagai berikut;

A. POLITIK

Faktor politik terutama melihat tingkat intervensi pemerintah, yaitu melalui instrumen: (1) legal (*legislation*), (2) kebijakan (*policy*), dan (3) kelembagaan (*institution*).

1. Instrumen legal

Instrumen legal meliputi Undang-Undang diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
3. UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
4. UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
5. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
7. PP Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
8. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Instrumen Kebijakan

Kegiatan komunikasi humas DPR-RI merupakan kegiatan dalam rangka Strategi Komunikasi *Public Relation* Biro Pemberitaan DPR-RI yang meliputi :

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan Parlemen
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan Parlemen
3. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan Parlemen
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen
5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan, pelyanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan
6. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan
7. Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website
8. Penyelenggaraan urusan penerbitan
9. Penyelenggaraan hubungan masyarakat
10. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

3. Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pranata Humas DPR RI, Indah Kurniasari pada tanggal 10 Desember 2019 di Kantor Humas Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, ia menyampaikan bahwa fungsi dan tugas Humas DPR-RI, berada di Biro Pemberitaan Parlemen, di level eselon 2, kepala biro pemberitaan parlemen. Humas membawahi 4 fungsi: (1) Bagian media cetak, (2) Bagian TV dan radio parlemen, (3) Bagian penerbitan, dan (4) Bagian Media sosial.

Lebih jauh Indah Kurniasari memaparkan bahwa secara kelembagaan DPR RI memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
2. Badan Musyawarah (disingkat Bamus) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
3. Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
4. Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
5. Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
6. Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
7. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
8. Badan Urusan Rumah Tangga (disingkat BURT) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
9. Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

B. EKONOMI DAN SOSIAL

Faktor Ekonomi yaitu terkait Anggaran dan Kebijakan Ekonomi. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kebijakan ekonomin terkait kegiatan Lembaga DPR RI dan rencanaprogram-progam DPR RI. Selanjutnya faktor sosial mencakup aspek-aspek yang terkait dengan Pemanfaatan media dalam penyebaran informasi kebijakan/informasi publik, layanan masyarakat dan progam berbagai *event* (kegiatan/acara) serta hubungan dengan media.

Pemanfaatan media untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan dan kebijakan kepada masyarakat melalui; Televisi, Radio dan media social seperti Facebook, Instagram, Twiter, email dan aplikasi DPR-Now. Layanan Masyarakat berupa pelayanan publik melalui system aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui situs <http://pengaduan.dpr.go.id> serta aplikasi DPR-Now serta masyarakat dapat juga datang langsung. Kegiatan event dan sosialisasi program melalui DPR Goes To Campus dan menjalin hubungan baik dengan media baik nasional atau internasional untuk membentuk citra baik kinerja DPR RI dimata masyarakat dan dunia internasional

C. TEKNOLOGI

Teknologi berupa sarana dengan tersediannya bahan-bahan yang dibutuhkan yang juga bisa diartikan sebagai barang-barang yang dipergunakan oleh manusia seperti sistem, jaringan, metode ataupun mesin. Faktor teknologi mencakup aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi berupa akses ketersediaan ketersediaan data dan informasi tentang program pemerintah dalam bentuk dokumen yang mudah diakses dan bebas biaya melalui internet, seperti website www.dpr.go.id dan media sosial seperti facebook [DPR RI](#), twitter [@DPR RI](#), chanel youtube [DPR RI OFFICIAL](#) dan instagram [DPR RI](#).

SIMPULAN

Pada Analisis PEST yang sudah dijabarkan pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa; lintrumen Politik legalitas memuat wewenang dan fungsi sebagai lembaga penyelenggara negara dalam perencanaan program pembentukan dan perubahan Undang-Undang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Instrumen kebijakan meliputi kordinasi pelaksanaan kegiatan unit tugas, perumusan dan evaluasi rencana strategis, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan progam tahunan.

Secara kelembagaan DPR RI memiliki dua karakteristik yang meliputi lembaga tetap dan lembaga sementara, yang kemudian dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut; DPR RI memiliki satu pemimpin dan wakilnya, sebagai badan musyawarah, komisi dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap, badan Legislasi dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap, Adan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap, Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara, Badan Urusan Rumah Tangga (disingkat BURT) dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.

Selanjutnya dalam intrumen Ekonomi dan Sosial meliputi; Anggaran dan Kebijakan Ekonomi, dimana DPR membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, serta faktor sosial mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan media dalam penyebaran informasi kebijakan/informasi publik, layanan masyarakat dan progam berbagai *event* (kegiatan/acara) serta hubungan dengan media. Sedangkan faktor Teknologi mencakup aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi berupa akses ketersediaan data dan informasi tentang program pemerintah tersediannya sistem dan jaringannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, Francis Joseph. (1967). *Scanning the business environment*. New York: Macmillan.
- Cutlip, Scoot M. dkk. (2005). *Effective Public Relation, Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan dengan Sukses Edisi Kedelapan*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Jefkins, Frank. (1992). *Public Relations Edisi 4*. Jakarta: Erlangga
- Kusumastuti, Frida. (2001). *Dasar-Dasar Humas*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kriyantono, Rachmad. (2008) *Public Relations Writing, Teknik Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Litbang Kompas (2019) "Citra DPR Menurut Litbang Kompas 2019", diakses 20 September 2020, tersedia pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/08370591/litbang-kompas-662-persen-responden-merasa-aspirasinya-tak-terwakili-dpr>.
- Mahadiansar dan Aspariyana (2020) "*PEST Analysis Model dalam Pengembangan Potensi Wisata Pulau Benan, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.*" *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 2020 Vol. 01 (1), 14-25.
- Mory, Piet Magda. (2008). "Analisis Peran, Fungsi, Tugas dan Strategi Humas pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia." Jakarta: Universitas Indonesia.
- Peppard, J. (2002), *Strategic Planning For Information Systems*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
- Ruslan, Rosadi. (2010). *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Saputra, Wahidin dan Rulli Nasrullah. (2011). *Teori dan Praktik Publik Relations*. Depok: Gramata Publishing.
- Syahputra, Iswandi. (2019). *Media Relations, Teori, Strategi Praktik, dan Media Intelijen*. Depok: Rajawali Press.